

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya termasuk dalam urutan keempat terbanyak didunia dengan selalu meningkat di setiap tahunnya (Dirjen Dukcapil Kemendagri). Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada pertengahan tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa, dan pada pertengahan tahun 2021 angka tersebut kembali naik menjadi 272,68 juta jiwa, kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% jika dibandingkan periode tahun lalu. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak pula pada pembangunan yang digunakan untuk kebutuhan kepentingan umum.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari tempat satu ketempat lainnya dengan tujuan ke arah yang lebih baik sesuai aturan yang sudah ditetapkan secara tersusun, terencana, berkelanjutan, dan bertahap. Suatu lingkup pembangunan memberikan ruang yang sistematis dan saling berkesinambungan guna menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap warganya, yang mana suatu proses memiliki hakikat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya (Haniffudin, 2019). Jika berbicara mengenai pembangunan maka tidak terlepas dengan pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur merupakan syarat yang diperlukan dalam suatu pembangunan. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu roda penggerak yang dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun diberbagai kegiatan sosial lainnya.

Dewasa ini, untuk mendorong kesatuan perekonomian masyarakat, pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup pada semua wilayah. Dengan demikian

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata berdasarkan dasar negara pancasila dan UUD 1945 dapat terealisasikan dengan baik (Wildasari, 2020). Namun, untuk mewujudkan keterpaduan dalam suatu pembangunan tidak lah mudah seperti yang dibayangkan. Terlebih lagi dalam lingkup pembangunan berkelanjutan, karena pada pembangunan tersebut agenda pembangunan yang menetapkan keberlanjutan dan kesetaraan harus lebih diutamakan menjadi agenda pembangunan selanjutnya (Badan Pusat Statistik). Dimana, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyempurnakan pembangunan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik dengan mewujudkan wilayah unggul dan berkualitas.

Pada bulan September 2000 para pemimpin dunia melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan dihadiri oleh 189 negara anggota yang diantaranya masyarakat sipil dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia dengan membuat keputusan penting dalam suatu sejarah pembangunan dunia yang pendekatannya dilakukan secara mendalam dan terperinci demi pemenuhan hak-hak dasar manusia. KTT Milenium yang dilakukan dengan menyepakati pembangunan yang disebut *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan Pembangunan Milenium (Widjojo, 2004). MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi pada saat KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. MDGs memiliki 8 tujuan yang sangat beragam, masing-masing tujuan memiliki target dan indikator yang hendak dicapai sampai tahun 2015. Desember 2015 menjadi titik terakhir pengimplementasian MDGs di seluruh negara khususnya Indonesia, sehingga pada tahun terakhir pelaksanaan MDGs, Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas dan taraf hidup bagi rakyatnya (Wahyuningsih, 2018). Dengan berakhirnya MDGs ini menjadi titik awal bagi negara di seluruh dunia dalam merencanakan strategi baru untuk pembangunan global sebagai tindak lanjut dari MDGs (Kemendes).

Agenda selanjutnya untuk melanjutkan MDGs yaitu dengan mengembangkan suatu konsep dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015 yang disebut

dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adanya konsep SDGs diperlukan sebagai penerus sekaligus penyempurna pembangunan baru yang telah dipertimbangkan semua perubahannya pasca 2015. Pada 25-27 September 2015, perwakilan 193 negara yang tergabung dalam PBB menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan di New York, Amerika Serikat untuk membahas mengenai dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil pertemuan tersebut menyepakati dan mengesahkan dokumen pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan dibagi ke dalam 169 target serta 241 indikator yang saling berkaitan, target yang terukur, dengan target waktu yang telah ditentukan selama 15 tahun hingga tahun 2030 (Iskandar, 2020). Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang dan menargetkan pengurangan separuh dari target tujuan global, SDGs mencangkup dalam skala lebih besar dengan bertujuan untuk melengkapi seluruh target yang belum ada di dalam MDGs. SDGs lebih memiliki sasaran yang saling terkait, mempengaruhi, inklusif dan saling terintegrasi, universal, atau tidak satu orang pun yang tertinggal (*no one left behind*).

Pada tanggal 4 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, hal tersebut menandakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menjalankan SDGs. Melalui Peraturan di atas, dalam penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana aksi nasional maupun daerah yang dilakukan oleh Kementrian dan Pemerintah Daerah menjadikan SDGs sebagai pedoman dalam agenda pembangunan nasional dan daerah (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Dimana, lingkup pemerintahan daerah menjadi peran utama dalam memfasilitasi mobilisasi para pemangku kepentingan dengan memperkenalkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di wilayah masing-masing (Reddy, 2016). TPB menekankan peran penting Pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (De Matteis, 2021). Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan merangkul *stakeholders* lainnya dalam berkolaborasi pada proses pembangunan berkelanjutan yang kemudian di implementasikan

dalam dokumen perencanaan daerah. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menciptakan tanggung jawab baru bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong peran institusional pemerintah dengan menjalankan mandat dalam menghasilkan program-program strategis yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat (Zeemering, 2018) dalam (Kusuma, 2023). Pemerintah daerah maupun Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintah terkecil merupakan salah satu penanggungjawab utama dalam melaksanakan SDGs ditingkat nasional maupun global.

Sebagai upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menerbitkan Permendesa PDPT Nomor 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa dengan bertujuan agar pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa. Peraturan tersebut dilatarbelakangi pemikiran mengenai model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, disusun SDGs Desa dengan penambahan 1 tujuan sehingga menjadi 18 tujuan yang berisi kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Hal tersebut dikarenakan untuk menjamin suatu pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. 18 tujuan SDGs Desa yaitu (1) Desa tanpa kemiskinan, (2) Desa tanpa kelaparan, (3) Desa sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan desa berkualitas, (5) Desa berkesetaraan gender, (6) Desa layak air bersih dan sanitasi, (7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, (8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, (9) infrastruktur, industri, dan inovasi, (10) Desa tanpa kesenjangan, (11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, (12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, (13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, (14) Ekosistem laut desa, (15) ekosistem daratan desa, (16) Desa damai dan berkeadilan (17) Kemitraan untuk pembangunan desa, dan (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Penetapan 18 tujuan dan sasaran SDGs Desa menjadi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan berkelanjutan.

Artinya, kehadiran SDGs Desa menjadi acuan utama dalam pembangunan jangka menengah desa di seluruh Indonesia. Selain itu, pelaksanaan SDGs Desa diperlukan komitmen dan keberanian bersama para aparatur, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa ataupun para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan SDGs Desa sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik, maka dibutuhkan poin 9 yang terdapat pada kerangka SDGs Desa dengan berpusat pada tiga pilar utama yakni infrastruktur, industri, dan inovasi, dengan memiliki 8 target dan 12 indikator. 8 target yang dimaksud diantaranya yaitu (1) meningkatkan infrastruktur andal, berkelanjutan dan tangguh, (2) mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, (3) meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap layanan jasa keuangan, (4) meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri, (5) memperkuat riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri, (6) memfasilitasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan keuangan dan teknologi, (7) mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi, serta (8) meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dimana, saat ini fokus pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima prioritas kerja pemerintah Joko Widodo. Infrastruktur yang tepat akan mengangkat peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nasional yang berdaya saing (KPPIP, 2017). Kemajuan komitmen tinggi pemerintah ditunjukkan dengan telah mengakomodasi SDGs dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta dukungan anggaran dari APBN dan APBD (Sekretariat ASEAN, 2020) dalam (Nauli, 2022). Penetapan SDGs Desa poin 9 mempercayai bahwa industrialisasi harus inklusif, berwawasan sosial, dan berkelanjutan, sedangkan infrastruktur

harus tangguh, dan inovasi teknologi harus mengangkat peran sentral dalam mencapai tujuan poin 9 melalui efisiensi sumber daya dan energi serta akses teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu tujuan yang terdapat pada poin 9 target 8 dengan berbunyi “Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi”. Pada indikator 8 yang tercantum dalam kerangka SDGs poin 9 ini merupakan salah satu kunci utama untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan dimasa yang akan datang. Tujuan pada target 8 yaitu menyediakan akses universal dan terjangkau internet terkhusus pada negara kurang berkembang. Dimana, saat ini inovasi digital sangat penting untuk memudahkan akses melalui suatu informasi yang nantinya hasil pada inovasi tersebut dapat mendorong pada ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Dengan adanya inovasi *e-government* diharapkan terdapat tata kelola pemerintahan yang baik yang memungkinkan adanya interaksi dalam melakukan berbagai komunikasi melalui berbagai *platform* yang mudah digapai berupa aplikasi facebook, instagram, tiktok, whatsapp, youtube, dan lain sebagainya. Dengan munculnya *platform* digital, hubungan pemerintah akan berubah dari hierarki ke dalam hubungan yang lebih terbuka (Cordella, 2019).

Desa memiliki kontribusi besar sebagai entitas terdepan terhadap pencapaian TPB dengan sebesar 74%. Angka tersebut diperoleh berdasarkan aspek kewilayahan dan aspek kewarganegaraan (Kominfo, 2020). Kehadiran TPB/SDGs desa bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar dapat membentuk kesempatan kerja yang layak. Hal ini tentu berkaitan dengan terciptanya inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman yang bisa memberikan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan untuk masyarakat desa. Inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal tersebut bisa dilihat dengan realitas yang ada, bahwa sebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat dan masih terjadinya birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018). Inovasi

menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Dengan begitu, proses, hasil pengembangan, dan/atau pemanfaatan suatu produk dan sumber daya yang telah ada sebelumnya dapat memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas antar pemerintah dan masyarakat. Artinya, masyarakat akan menerima pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh publik yang terdapat pada sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dirasa sangat signifikan, sehingga mampu membawa perubahan bagi aspek kehidupan, termasuk dalam aspek kinerja pemerintahan melalui aktivitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berpengaruh pada bidang komunikasi namun juga pada segi pengambilan keputusan melalui kecepatan pengolahan data pada suatu pelayanan (*service*) (Yazdi, 2012). Perkembangan TIK telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya dengan lebih terbuka. Oleh karenanya, Penggunaan TIK yang pesat adalah salah satu bentuk nyata revolusi industri 5.0. Saat ini, teknologi sudah tidak hanya berdampak pada sektor bisnis, pendidikan, masyarakat, serta pemerintahan di tingkat pusat saja, namun hingga ke tingkat daerah ataupun Desa. Salah satu program yang terkait dengan penggunaan teknologi yang telah dilakukan di desa adalah digitalisasi Desa menuju Desa digital. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang sering terjadi di Desa. Melalui digitalisasi Desa, inovasi TIK dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan untuk menunjang pelayanan publik yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat (Putrawan, 2021).

Program inovasi Desa menjadi topik pembicaraan utama, karena instansi pemerintah menghadapi tantangan yang menuntutnya untuk mampu berkembang dalam menghadapi dinamika organisasi yang semakin kompetitif. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan manajemen inovasi dengan mencakup berbagai dimensi dan berbagai aspek terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada (Gupta, 2018) dalam (Isbandono, 2022). Seluruh instansi pemerintah

diharuskan mampu beradaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi menjadi pelayanan berbasis teknologi. Hal tersebut bertujuan agar birokrasi pada setiap instansi pemerintah dapat melayani masyarakat dengan baik (Sukarno, 2021).

Munculnya pelayanan berbasis teknologi pada seluruh instansi pemerintah dengan semua kegiatan sudah berbasis digital dikarenakan pasca merebaknya pandemi covid-19 yang mengharuskan lembaga publik atau institusi pemerintah melakukan akselerasi digital guna mengoptimalkan pelayanan publik (Agostino, 2020) dalam (Lumbanraja, 2020). Oleh karenanya, pelayanan secara konvensional yakni dengan bertatap muka diharuskan cepat dalam beradaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi. Artinya, birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas, serta transparansi pelayanan publik (Septiani, 2020) dalam (Sukarno, 2021). Oleh karenanya, hal tersebut memunculkan urgensi terhadap penerapan dan akselerasi pengembangan *e-government* oleh instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Desa.

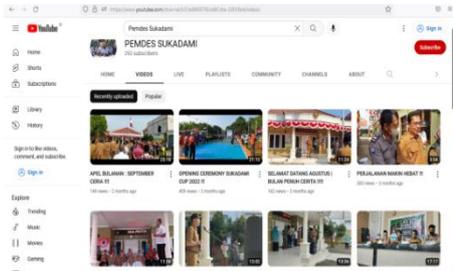
Pemerintah Desa Sukadami yang terletak di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Desa yang telah membuat perubahan baru melalui pemanfaatan pada inovasi *e-government* Desa. Dimana, Desa Sukadami termasuk dalam wilayah Kecamatan Cikarang Selatan dengan di kelilingi oleh 7 Desa diantaranya seperti Desa Ciantra, Desa Cibatu, Desa Pasirsari, Desa Sukadami, Desa Sukaresmi, Desa Sukasejati, dan Desa Serang. Dari ketujuh Desa tersebut, Desa Sukadami merupakan desa yang sudah menerapkan inovasi *e-government* dengan berusaha mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa poin 9 target 8. Dapat dilihat dengan sudah meluncurkannya inovasi teknologi informasi dan komunikasi jika dibandingkan dengan 7 Desa sekitarnya. Desa Sukadami pun sudah termasuk strata mandiri yang diharuskan mampu membuat perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman seperti membuat inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang bisa memberikan suatu bentuk pemberdayaan dan pelayanan

masyarakat Desa. Hal tersebut berupaya agar dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan memudahkan masyarakat dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan tanpa harus berpusat di kantor Desa saja. Pemerintah Desa Sukadami sedang gencar-gencarnya melakukan trobosan baru terkait inovasi TIK dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Trobosan inovasi tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan prima dan transparan terhadap masyarakat.

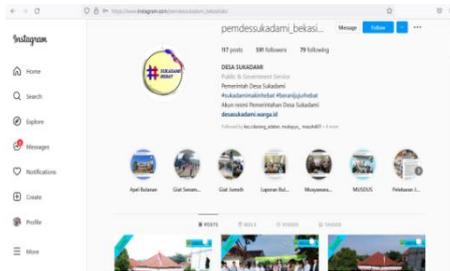
Saat ini, seluruh kegiatan yang ada di Desa Sukadami sudah serba digital dengan seluruh pelaksanaannya bisa diakses dimana pun dan kapan pun. Regulasi Inovasi Desa tercantum dalam peraturan Desa Sukadami Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi. Penggunaan inovasi desa mulai diterapkan pada 1 Juni 2021. Inovasi yang diluncurkan dan sedang berjalan di kantor pemerintah Desa Sukadami diantaranya terdapat aplikasi Instagram ([@Pemdessukadami\\_bekasikab](#)), Youtube ([Pemdes Sukadami](#)), dan Facebook ([Sukadami](#)). Desa Sukadami pun bekerja sama dengan media digital dan media cetak ([Metro Cikarang](#)), kemudian terdapat situs *website* Desa Sukadami [desasukadami.warga.id](#). Di dalam situs *website* yang disediakan tersebut sudah mencakup informasi yang cukup untuk standar suatu lembaga pemerintahan, seperti sejarah Desa Sukadami, Visi-Misi Desa Sukadami, struktur organisasi, informasi jumlah RT/RW, informasi PPKM dan Covid-19, sistem informasi Desa, pelayanan surat digital seperti *website* sistem pelayanan administrasi terpadu (SISPAT), *website* SISPAT RT, *website* KAURKASI, dan lain sebagainya. Seluruh inovasi yang terdapat pada Desa Sukadami dapat dilihat pada gambar 1.1. di bawah ini :

Gambar 1. 1

### Inovasi Desa Sukadami



Youtube



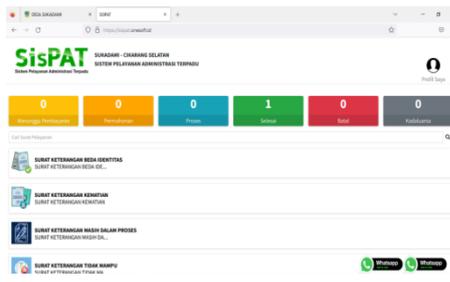
Instagram



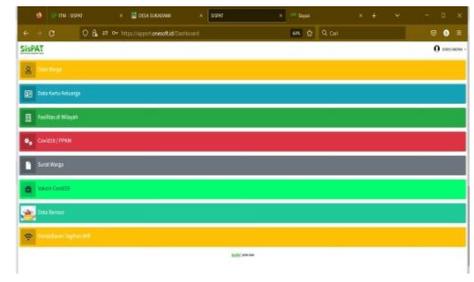
Facebook



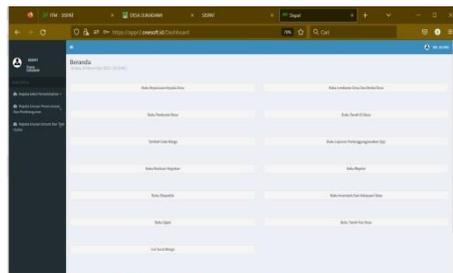
Website Desa Sukadami



Website SISPAT



Website SISPAT RT



Website KAURKASI



Media Cetak



Media Digital

Sumber: Pemerintah Desa Sukadami, 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa ditemui banyak inovasi yang baru dijalankan oleh pemerintah Desa Sukadami untuk seluruh masyarakat. Melalui hasil wawancara bersama Sri Murni N.A.A, S.Sos selaku operator Desa

Sukadami dapat diketahui bahwa inovasi tersebut memiliki fungsi masing-masing, berikut tanggapan dari operator Desa Sukadami :

“Sekarang Desa Sukadami sudah serba digital, inovasi yang sudah dimanfaatkan memiliki fungsinya seperti Instagram dan Youtube yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa kegiatan yang dijalankan oleh Desa Sukadami, dan terdapat aplikasi Facebook. Kemudian memiliki *website* resmi Desa Sukadami, di dalamnya terdapat berbagai macam informasi dan *website* yang sudah disediakan seperti *website* SISPAT untuk pelayanan surat, *website* SISPAT RT mengenai fasilitas yang berada dalam lingkup RT berupa data warga, bansos, profil penduduk, dan lain-lain, *website* KAURKASI digunakan oleh seluruh pihak desa, tetapi untuk fiturnya berbeda. Fitur yang digunakan oleh pihak desa untuk approve surat, jadi masing-masing bagian dan bidangnya disesuaikan, contoh kaur keuangan mengisi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan administratif keuangan, kaur perencanaan tentang hal-hal yang menyanggung dengan perencanaan, entah itu RKPD ataupun RPJMD, kaur umum untuk pencatatan aset, dan seterusnya. Desa Sukadami juga bekerjasama dengan media digital dan cetak seperti Metro Cikarang”.

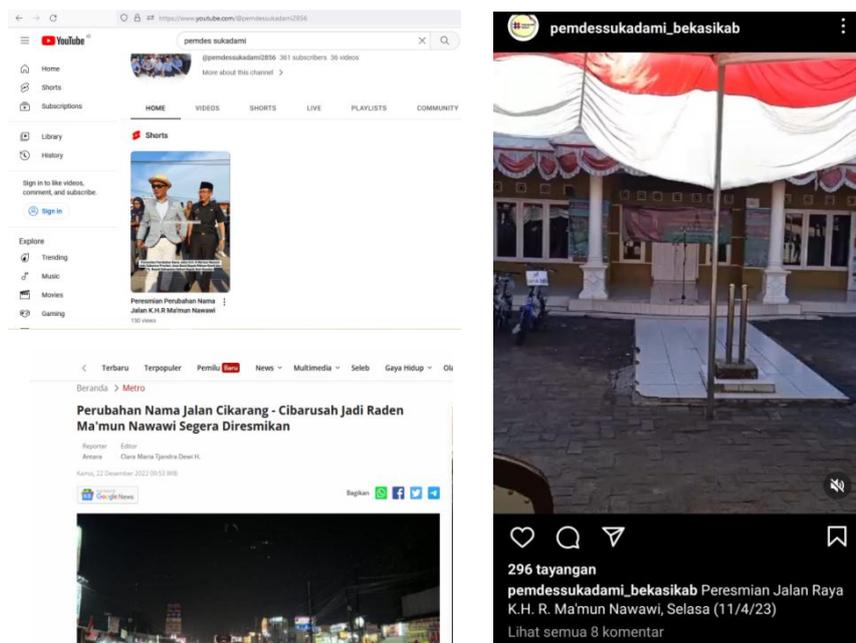
Berdasarkan tanggapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh inovasi Desa Sukadami memiliki fungsinya tersendiri yakni, aplikasi Instagram, facebook, dan Youtube berfungsi untuk memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Desa Sukadami, yang membedakan hanya pada durasi kegiatan, di dalam youtube Desa Sukadami lebih menjelaskan secara detail kegiatan yang sedang dijalanannya. Desa Sukadami pun bekerja sama dengan media digital dan media cetak (Metro Cikarang) yang bertujuan untuk memudahkan aparatur desa dalam menerbitkan berita online dan surat kabar, kemudian terdapat *Website* SISPAT RT yang berfungsi untuk menginput data warga, bansos, profil penduduk, dan lain sebagainya yang mencakup ruang lingkup RT, lalu terdapat *website* KAURKASI yang diperuntukkan oleh aparatur Desa, tetapi untuk fitur yang digunakan oleh masing-masing aparatur pemerintah berbeda. Fitur yang digunakan oleh pihak desa dimanfaatkan untuk *approve* surat, jadi masing-masing bagian dan bidangnya disesuaikan, serta terdapat pelayanan surat digital seperti *website* sistem pelayanan administrasi terpadu (SISPAT). Bentuk pelayanan pada *website* SISPAT terdapat 2 jenis yaitu eksternal dan

internal. Untuk eksternal memberikan pelayanan digital kepada masyarakat dalam mengurus segala administrasi yang dibutuhkan. Sedangkan jika yang bersifat internal digunakan untuk pemerintah Desa dan ibu PKK sebagai absensi yang menggunakan *QR barcode*.

Seluruh inovasi yang baru saja diluncurkan oleh Desa Sukadami ini tidak hanya sebagai formalitas dalam pembuatannya saja, tetapi memang dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur Desa Sukadami dan juga masyarakat, karena memang di dalam informasi Desa terdapat berita-berita atau aktifitas harian yang *ter-update*. Dimana, informasi yang disebarkan oleh aparatur Desa pun tidak hanya dikirimkan melalui salah satu *platform* digital saja, melainkan di unggah melalui berbagai *platform* digital. Dapat dilihat contoh unggahan pada gambar 1.2. di bawah ini :

**Gambar 1. 2**

### Unggahan Desa Sukadami



Sumber : *Youtube, Instagram, berita online Metro Cikarang*

Berdasarkan gambar di atas dapat di lihat bahwa memang inovasi Desa Sukadami dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur dan juga masyarakat Desa

Sukadami. Dimana, informasi yang di unggah oleh pihak Desa terdapat diberbagai *platfrom* digital Desa Sukadami. Kemudian tayangan video yang ditonton baik di youtube ataupun instagram tidak hanya sedikit, tetapi lebih dari ratusan orang yang melihat, dan juga terdapat komentar positif yang diberikan oleh masyarakat. Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Sri Murni N.A.A, S.Sos selaku operator Desa yang mengelola Inovasi Desa Sukadami, menyatakan bahwa inovasi yang sudah diluncurkan ini memang sudah diikuti oleh beberapa masyarakat Sukadami, dapat di lihat jumlah pengguna masyarakat yang sudah mengikuti dan memanfaatkan inovasi yang dibuat oleh Desa pada tabel 1.1. di bawah ini.

**Tabel 1. 1**

**Data Pengguna Masyarakat Yang Sudah Menggunakan Fasilitas Desa Sukadami**

<b>Platfrom Desa Sukadami</b>	<b>Jumlah Masyarakat</b>
Youtube	361
Instagram	754
Facebook	2.685
Website SISPAT	690
Website SISPAT RT	113
Website KAURKASI	25
<b>JUMLAH</b>	<b>4.628</b>

Sumber : *Platfrom digital Desa Sukadami*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *Platform* digital yang sudah difasilitasi oleh aparat Desa untuk masyarakat ini memang belum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat Sukadami, karena jika dilihat pada jumlah data di atas pun masih dikatakan jauh dengan jumlah penduduk yang ada di Sukadami. Tetapi, jika berbicara suatu *platform* digital tidak dapat dipastikan dan bukan berarti menjadi patokan bahwa jumlah warga Desa Sukadami yang menggunakan seluruh fasilitas pada inovasi Desa hanya sedikit, melainkan bisa saja terdapat masyarakat yang memang hanya melihat dan membaca perkembangan informasi yang ada, tanpa mengikuti suatu aplikasinya. Kemudian jika melihat pada *Website* SISPAT yang difasilitasi untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik ini belum pula sepenuhnya digunakan secara merata oleh masyarakat luas. Dapat dilihat rekapitulasi data mengenai pelayanan publik tahun 2021-2022 pada Tabel 1.2 :

**Tabel 1. 2**

**Rekapitulasi Pelayanan Surat Pada Tahun 2021-2022**

NO	Jenis Surat	Pelayanan Manual		Pelayanan Online	
		2021	2022	2021	2022
1	Surat keterangan usaha	397	482	19	40
2	Surat keterangan kematian	122	80	3	5
3	Surat keterangan tidak mampu	444	517	13	25
4	Surat pengantar membuat SKCK	364	517	47	55
5	Surat keterangan domisili usaha / perusahaan	64	12	9	20
6	Surat pernyataan perjaka atau perawan	2	0	3	3
7	Surat keterangan beda identitas	6	0	8	5
8	Surat keterangan domisili tempat tinggal	2.271	604	47	65
9	Surat pengantar pindah WNI	0	0	0	0
10	Surat pengantar numpang nikah	380	0	2	3

11	Surat keterangan domisili haji	27	0	0	0
12	Surat keterangan domisili usaha perseorangan	15	0	0	0
13	Surat keterangan domisili lembaga / yayasan	2	0	0	2
14	Surat keterangan domisili tempat tinggal WNA	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>4.094</b>	<b>2.212</b>	<b>151</b>	<b>224</b>

Sumber : *Pemerintah Desa Sukadami, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan secara manual masih dominan jika dibandingkan dengan masyarakat yang sudah melakukan pelayanan berbasis digital. Namun, jika dilihat pada jumlah per-tahun 2021-2022 untuk pelayanan manual memiliki penurunan dan untuk pelayanan berbasis digital memiliki peningkatan. Artinya, inovasi Desa ini sudah mulai diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun memang masih tinggi tingkat penggunaan manual. Hal tersebut dikarenakan stigma masyarakat yang lebih memilih untuk tetap mendatangi langsung kantor Desa agar mudah berkonsultasi pada pihak Desa, dan masyarakat belum bermigrasi untuk menggunakan pelayanan digital. Untuk itu masih perlunya arahan dan petunjuk baik dari aparatur Desa, Ketua RT dan Ketua RW dalam memanfaatkannya. Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Sri Murni N.A.A, S.Sos selaku operator Desa menyampaikan bahwa :

“Pelayanan saat ini memang masih dominan manual dikarenakan tidak semua masyarakat bisa dalam menggunakan teknologi khususnya di kalangan orang tua yang tidak semua memiliki perangkat yang memadai dan beberapa masyarakat pun masih belum mengetahui inovasi yang sudah diluncurkan oleh pihak Desa, kemudian juga masyarakat Sukadami masih kurang pasrtisipasinya dalam pengembangan inovasi desa. Sosialisasi yang sudah diarahkan kepada ketua RT dan RW setempat pun belum dilakukan secara merata pada masyarakat”

Permasalahan tersebut tentunya sangat disayangkan jika tidak di atasi dengan cepat, karena memang inovasi yang diluncurkan oleh pihak Desa guna

memudahkan penduduk Sukadami dalam pemanfaatannya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan inovasi Desa yang memang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Sukadami.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pemanfaatan Inovasi Electronic Government Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa Poin 9 Target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi”***

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pemanfaatan inovasi *electronic government* dalam upaya mewujudkan *sustainable development goals* desa poin 9 Target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pemanfaatan inovasi *electronic government* dalam upaya mewujudkan *sustainable development goals* desa poin 9 Target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setelah mendapatkan perumusan masalah dan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan inovasi *electronic government* dalam upaya mewujudkan *sustainable development goals* desa poin 9 Target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pemanfaatan inovasi *electronic government* dalam upaya mewujudkan *sustainable development goals* desa poin 9 Target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

#### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, secara garis besar, signifikan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu signifikan akademik dan signifikan praktis. Berikut penjabarannya :

##### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi literatur pada penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan judul peneliti, dimana bertujuan untuk dijadikan bahan acuan atas penelitian yang akan dilakukan, berikut adalah studi terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian :

Jurnal pertama, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pengelolaan Kepegawaian Aparatur Desa Melalui Aplikasi SIMPEG Dalam Mewujudkan SDGs Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”** pada tahun (2022). Ditulis oleh Noviyanti, Prasetyo Isbandono, Dian Arlupi Utami, Haryo Kunto Wibisono, dan Weni Rosdiana. KMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 10(1), 23-33. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG dapat digunakan sebagai panduan manajemen kepegawaian desa, menambah pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi aparatur pemerintah desa dan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip *e-government* dan tertib administrasi kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG telah mewujudkan SDGs Desa point 17 (kemitraan untuk pembangunan desa melalui pengelolaan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi). Akan tetapi, perlu adanya *button upload* yang berfungsi mengupload berkas terkait dengan beberapa menu data

kepegawaian seperti riwayat pendidikan, riwayat diklat, dan riwayat penghargaan. *Button upload* dapat digunakan sebagai arsip elektronik yang menunjang informasi.

Jurnal kedua, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs : Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas”** pada tahun (2019). Ditulis oleh Muhammad Yamin, Arief Bakhtiar Darmawan, Nurul Azizah Zayzda, dan Maiza ash-Shafikh. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2), 133-143. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Melung sudah memiliki kesadaran yang baik akan prinsip *Open Government* yang telah dimiliki oleh perangkat Desa dengan memberikan pelayanan yang akuntabel pada masyarakat. Hal ini terbukti dari pemaparan informasi berupa anggaran dana desa, undang-undang, dan kebijakan desa dalam situs resmi Desa Melung. Situs desa ini telah memiliki kolom pencarian dan dokumen yang cukup detail serta menampilkan berita secara berkala. Kesadaran mengenai *Open Government* yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan SDGs Desa poin 17 telah menjadi modal *e-Government* Desa Melung. Dengan tahapan yang telah dicapai, maka Desa Melung dapat di kategorikan ke dalam tahap *enhanced presence*.

Jurnal ketiga, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi SDGs Menerapkan Metode Agile Dengan Framework Codeigniter Di BPS Asahan”** pada tahun (2022). Ditulis oleh Dewi Wulansari, Rizky Fauziah, dan Abdul Karim Syahputra. J-Com (Journal of Computer), 2(2), 77-84. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengembangkan sistem aplikasi SDGs Desa Cinta Statistik dari berbasis desktop beralih ke berbasis web menjadi lebih efektif dan efisien kegunaannya, serta sangat membantu pihak BPS Asahan dalam melaksanakan Program Pembinaan Statistik Sektor Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam mengelola data SDGs Desa, dengan begitu data yang tersimpan akan aman, cepat, tepat, akurat, dan tidak mudah hilang karena sistem ini mempermudah dalam penyajian laporan yang langsung dapat diekspor ke excel.

Jurnal keempat, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pelatihan Penggunaan aplikasi Emulator android untuk Membantu Proses**

**Penginputan Data SDG’S Desa 2021 Di Desa Pallis, Kabupaten Polewali Mandar”** pada tahun (2021). Ditulis oleh Musafira, A. Seppewali, Darmawati, Riswan, dan Harmanujan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 579-584. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Desa Pallis dan tim relawan SDGs Desa telah mengetahui cara menginstall dan menggunakan aplikasi emulator android tipe *bluestack*. Tim relawan dan aparat Desa Pallis dapat memanfaatkan aplikasi emulator android tipe *bluestack* untuk menginput data SDGs. Sekitar 90% peserta pelatihan mampu memahami materi yang diberikan dan menggunakan aplikasi emulator android *bluestack* pada penginputan data SDGs 2021.

Jurnal kelima, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta”** pada tahun (2021). Ditulis oleh Fadjarini Sulistyowati, Hari Saptaning Tyas, MC. Candra Rusmala Dibyorini, dan Condrodewi Puspitasari. *Jurnal Iptekkom (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 23(2), 213-226. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SID mendukung terwujudnya *smart village* serta pengembangan SID memberikan manfaat dukungan data yang akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan desa dan pelayanan pada masyarakat. SID telah berperan dalam mewujudkan *smart village* dengan mendorong relasi antar pihak kalurahan, masyarakat, dan lingkungan.

Jurnal keenam, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemanfaatan Website Desa Dalam Optimalisasi Informasi Publik kepada masyarakat di Desa Kiringan”** pada tahun (2020). Ditulis oleh Ridho Pamungkas, Saifullah, Qoirrudin Raga Pratama, dan Okky Aldhy Try Cahyo. *JURNAL DAYA-MAS*, 5(2), 32-38. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tampilan di dalam *website* sudah sesuai dan informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umum. Dimana, dalam *website* desa sudah menjelaskan informasi yang sesuai dengan kebutuhan seperti agenda, gallery, download, dan lain sebagainya. Pada sistem administrasi manajemen konten terdapat *plugin-plugin* yang membantu pengelola dalam melakukan penambahan, perubahan, dan menghapus konten.

Jurnal ketujuh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar”** pada tahun (2020). Ditulis oleh Farniwati Fattah dan Huzain Azis. Ilmu Komputer Untuk Masyarakat, 1(1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para staf Desa Tonasa masih kurang data untuk menunjang suatu informasi atau pengumuman yang dapat ditampilkan di dalam *website* yang membuat tampilan web masih terbatas, serta belum adanya bidang yang mengelola pemanfaatan *website*. Dengan telah diadakannya pelatihan ini diharapkan aparat desa dapat menunjuk salah satu staf desa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola *website*, dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang proses pengelolaan *website*, serta perlu adanya pelatihan lebih lanjut dan pelatihan menulis agar redaksi yang disajikan menarik untuk dibaca.

Jurnal kedelapan, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar”** pada tahun (2022). Ditulis oleh *Novi Anggraeni dan Hanny Purnamasari*. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar. NUSANTARA:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6), 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan inovasi pada sistem aplikasi Sapa Cetar yang diperuntukkan masyarakat desa diharapkan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan secara cepat, mudah, dan terarah. Masih terdapat kendala dalam proses implementasi yang memerlukan saran dan perbaikan terhadap penerapan Sapa Cetar. Dengan membutuhkan sumber daya di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan implementasi *e-government*.

Jurnal kesembilan, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Inovasi Desa cerdas melalui pemanfaatan aplikasi SIKIA untuk peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan balita di masa Pandemi Covid-19 di Desa Triharjo, Bantul”** pada tahun (2022). Ditulis oleh Venny Vidayanti, Sri Hasta Mulyani, dan Rizky Erwanto. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(2), 1088-1101. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIKIA adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kader Desa Triharjo yang membuat pengerjaannya jadi lebih efektif dan efisien. Karena terjadi peningkatan nilai mean pengetahuan kader sebesar 18,41 poin setelah diberikan pelatihan dan demonstrasi pemanfaatan aplikasi.

Jurnal kesepuluh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Digitalisasi Pelayanan: Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Berbasis Website”** pada tahun (2022). Ditulis oleh Maylia Goswira Witri. ULIL ALBAB:Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1811-1826. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website [sedudo.kabnganjuk.go.id](http://sedudo.kabnganjuk.go.id) yang diluncurkan oleh Diskominfo Kabupaten Nganjuk telah diaplikasikan oleh pemerintahan Desa Trayang pada awal bulan Mei 2021. Selama menerapkan *website* ini pemerintahan Desa Trayang masih terdapat kendala yang dihadapi seperti masalah SDM, Pengambilan keputusan inovasi yang terlalu cepat, serta belum adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur penerapan *website* ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana, penelitian ini merupakan penelitian pertama di Kabupaten Bekasi yang membahas inovasi *e-government* dengan menyatukan kerangka SDGs. Pada penelitian ini tidak hanya membahas pemanfaatan inovasinya saja, melainkan membahas faktor penghambat dan faktor pendukung di dalamnya dengan menyatukan kerangka SDGs, Karena untuk membahas inovasi *e-government* dengan melihat kerangka kerja SDGs Desa yakni memfokuskan pada salah satu dari 18 poin khususnya pada poin 9 target 8 belum ada yang membahas secara detail. Namun, terdapat temuan penelitian terdahulu yang sama-sama memfokuskan salah satu poin SDGs, tetapi yang membedakan dari temuan yang ada pada penelitian terdahulu lebih mengangkat pada poin 17 (Kemitraan untuk pembangunan desa). Sedangkan untuk membahas inovasi teknologi informasi pada poin 9 target 8 belum dilakukan sebelumnya.

### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam “45” Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan baru kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi mengenai “*Pemanfaatan Inovasi Electronic Government Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa Poin 9 target 8 : Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi*”. Berbagai temuan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk dijadikan bahan referensi dan wawasan kepada masyarakat bahwasannya suatu inovasi *e-government* yang sudah berjalan ini merupakan wadah yang disediakan oleh aparatur Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, fleksibel, dan transparan di masa yang akan datang.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Disetiap bab terdapat sub-bab yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hal yang di bahas oleh peneliti. Dimana, penelitian ini memuat aturan yang sudah ditetapkan oleh program studi ilmu pemerintahan, Universitas Islam “45” Bekasi. Berikut kerangka sistematika penulisannya :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang topik penelitian yang diangkat. Dimana, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sigifikansi penelitian (signifikansi akademik dan significansi praktis), serta sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab kerangka teori ini menjelaskan teori atau dasar pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya.

Kemudian terdapat kerangka pemikiran, definisi operasional, serta asumsi penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab metodologi penelitian menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penulisan skripsi, di dalamnya meliputi paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data (teknik perolehan data dan teknik perekrutan informan), teknik analisis data, *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana, didalamnya terdapat penjelasan mengenai gambaran umum objek peneliti dan pembahasan mengenai data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan dengan teori yang dipilih oleh peneliti.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.